

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis dilakukan oleh Lovia Listiane Putri (2016) yang melakukan penelitian tentang Penggunaan Bank Garansi dalam Penyelenggaraan Pekerjaan Kontruksi Bank lampung di lampung pada tahun 2016. Hasil dari penelitian yang diperoleh Lovia Listiane Putri adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan surat keputusan direksi bank yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, relevansi dan signifikansi Bank Garansi dalam dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi adalah sebagai jaminan bagi penyedia jasa kepada pengguna jasa untuk memperoleh pertanggungjawaban dan kepastian hukum terhadap pekerjaan konstruksi apabila terjadi wanprestasi.

Lia Laurensia (2007) yang melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian Bank Garansi PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang semarang di semarang tahun 2007. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lia Laurensia ini adalah bahwa penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data

primer di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan di Bank Ekonomi Raharja dalam pelaksanaan pemberian bank garansi telah sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, letak perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah pada penelitian terdahulu tidak menemukan pengaruh secara simultan antara kualitas Kinerja dan Loyalitas terhadap hal-hal yang terkait didalamnya, loyalitas dan keadilan terhadap nasabah (*customer justice*) melalui pendekatan mekanistik, persamaannya adalah terletak pada apa yang dibahas yaitu tentang Pelaksanaan dan kinerja terhadap variabel-variabel lainnya.

Dengan demikian, paparan penelitian terdahulu yang diuraikan dan digambarkan sebelumnya memberikan gambaran mengenai kerangka penulisan/penelitian yang dilakukan penulisan tentang tema dan bahasan yang ditemukan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Garansi

Kasmir, (2004) bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan maupun perusahaan atau badan dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan ini maksudnya adalah bahwa bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang

dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan apabila yang dijaminkan di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.

Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian kita jumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut tender garansi (tender bond), atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk performance bond atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.

Dalam perjanjian bank garansi, terdapat tiga pihak yang saling terkait, yaitu :

1. Bank sebagai pihak yang memberikan garansi atau disebut juga pihak penjamin.
2. Pihak terjamin atau pihak yang dijamin ini merupakan debitur pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tertentu dalam perjanjian pokok dalam kegiatan perjanjian bank garasi.
3. Penerima jaminan ini merupakan pihak kreditur pihak yang berhak menuntut suatu prestasi tertentu dalam perjanjian pokok.

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling terkait satu sama lain, yaitu :

1. Pihak bank atau penjamin, mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak penerima jaminan apabila terjamin wanprestasi, dan berhak untuk memperoleh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi.
2. Pihak terjamin, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (sisa pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank) apabila terjadi pencairan bank garansi, dan berhak untuk memperoleh jaminan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.
3. Pihak Penerima Bank Garansi, mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada bank dengan pernyataan tertulis bahwa terjamin telah melakukan wanprestasi, dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila terjamin wanprestasi

2. Fungsi dan Manfaat Bank Garansi

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam perjanjian bank garansi terdapat tiga pihak saling terkait, dan bagi masing-masing pihak, bank garansi mempunyai fungsi tersendiri.

- a. Bagi pihak Bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank. Dari penerbitan bank garansi tersebut, pihak

bank memperoleh pendapatan dari provisi, biaya administrasi, serta bunga yang dikenakan. Selain itu, bank juga dapat mengopersikan dana jaminan bank garansi (deposit) yang diserahkan oleh nasabah di bidang perkreditan.

- b. Bagi pihak terjamin, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa nasabah akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah di perjanjikan. Hal ini berarti bank menunjang nasabah agar bisnis atau kegiatan usahanya berjalan dengan baik dan lancar.
- c. Bagi pihak penerima jaminan, bank garansi berfungsi sebagai suatu jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Bank garansi merupakan jaminan penanggungan atas resiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Dari sisi lain, masyarakat juga dapat memetik manfaat dari transaksi bank garansi, yaitu peningkatan arus barang dan lalu lintas pembayaran, kelancaran pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bank garansi, maka transaksi jual-beli barang dapat terjadi diantara pihak-pihak yang belum saling percaya, arus pemasukan barang dari luar negeri atau daerah lain menjadi semakin lancar, dan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek juga semakin lancar.

3. Jenis – Jenis Bank Garansi

Jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain :

- a. Bank Garansi Pembelian yaitu Bank garansi yang diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.
- b. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau yaitu Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok.
- c. Bank Garansi Penanggungan Bea Masuk yaitu Bank garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang-barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.
- d. Bank Garansi Tender (Bid Bond) yaitu Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir tersebut. Salah satu syarat agar kontraktor atau leveransir dapat mengikuti tender adalah menyerahkan bank garansi.
- e. Bank Garansi Pelaksanaan (Perfomance Bond) yaitu Bank garansi diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek oleh kontraktor atau leveransir tersebut.

- f. Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond) yaitu Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwheer) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir atas uang muka yang diterima oleh kontraktor tersebut.
- g. Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond) yaitu Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (Bouwhee) untuk kepentingan kontraktor atau leveransir guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.

4. Larangan dan Batasan dalam Pemberian Bank Garansi

- a. Adapun Larangan Larangan Dalam Pemberian Bank Garansi yaitu sebagai berikut :
 - 1. Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menerima bank garansi maka bank tidak boleh memuat syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi tersebut. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah / dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin. Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirnya bank garansi.
 - 2. Bank dilarang memberikan bank garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain.
 - 3. Bank dilarang memberikan jaminan dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk. Dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk.

4. Bank asing dilarang memberikan bank garansi untuk perusahaan yang di luar Jakarta.
5. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan bank garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal Larangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri.

b. Adapun Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

Bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian bank garansi selalu terkandung unsur resiko, Bank Indonesia menentukan pembatasan bank garansi sebagai berikut :

1. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian bank garansi dimaksud tidak melebihi 20 % dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.
2. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafid, dalam pengertian bahwa

bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri. Setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan.

3. Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur. 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi suatu debitur grup. Yang dimaksud dengan fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran BMP.

Berakhirnya Bank Garansi atau Garansi bank telah ditentukan oleh bank mulai berlakunya garansi dan berakhirnya garansi. Misalnya mulai garansi dari tanggal 20 oktober 2018 sampai dengan 30 Desember 2018. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, maka berakhirilah garansi bank yang dibuat oleh bank